

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 80, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administrative dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Adapun dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan BUMD, serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas BUMD dan Perangkat daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
4. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
6. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya manusia BUMD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian dengan 7 (tujuh) Kepala Sub Bagian. Klasifikasi kepegawaian dapat dirinci, sebagai berikut :

1. Klasifikasi Kepegawaian Menurut Eselon, sebagai berikut :

a.	Eselon II.B	:	1 orang
b.	Eselon III.A	:	2 orang
c.	Eselon IV.A	:	6 orang
d.	Staf	:	25 orang
	Jumlah total	:	34 orang

2. Klasifikasi Kepegawaian Menurut Pangkat / Golongan Ruang :

a.	Golongan IV-c	:	1 orang
----	---------------	---	---------

- b. Golongan IV-b : 2 orang
- c. Golongan IV-a : 3 orang
- d. Golongan III-d : 8 orang
- e. Golongan III-c : 9 orang
- f. Golongan III-b : 7 orang
- g. Golongan III-a : 1 orang
- h. Golongan II-d : 1 orang
- i. Golongan II-c : 2 orang
- Jumlah : 34 orang**

3. Klasifikasi Pendidikan Formal :

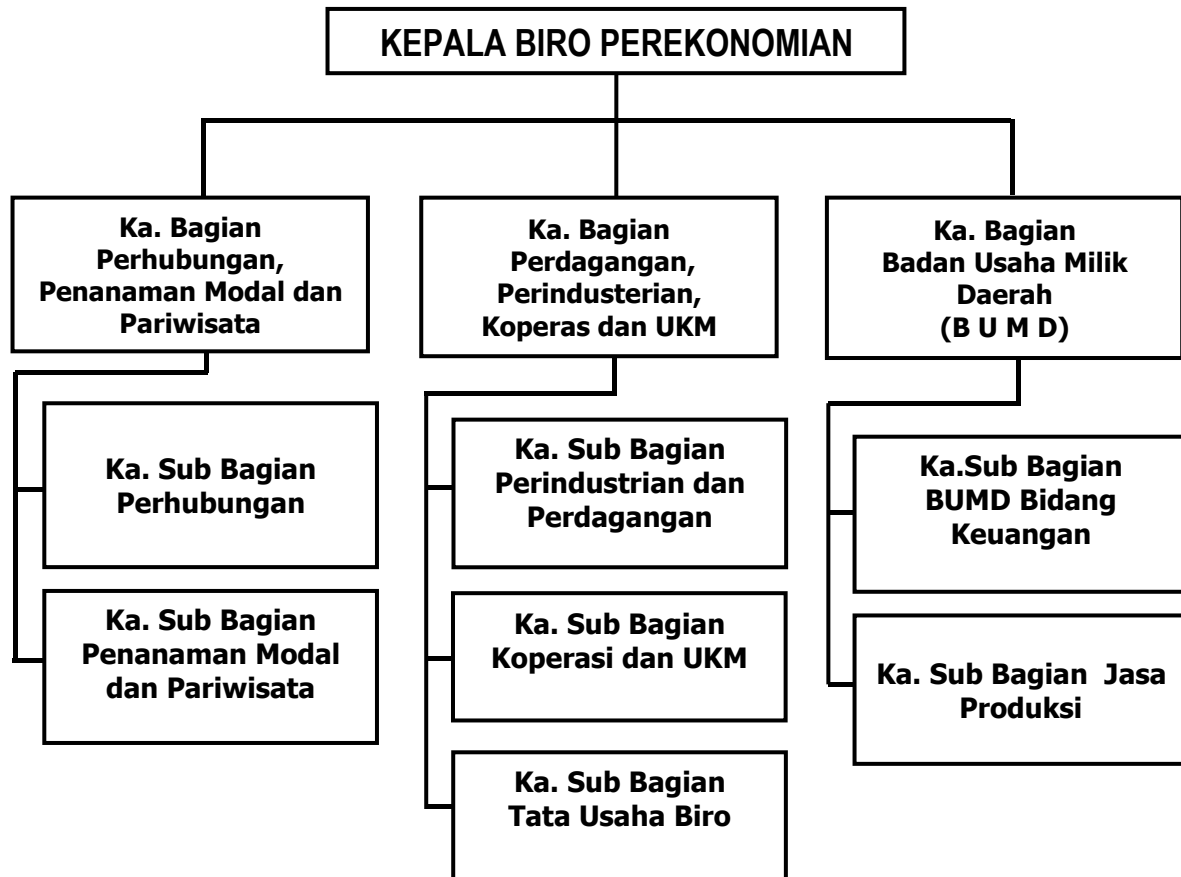
- a. Pasca Sarjana : 15 orang
- b. Sarjana : 10 orang
- c. Sarjana Muda : 2 orang
- d. SLTA : 7 orang
- Jumlah total : 34 orang**

Sedangkan susunan organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian;
2. Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
 - a. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Koperasi dan UKM;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
3. Kepala Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata
 - a. Kepala Sub Bagian, Penanaman Modal dan Pariwisata;
 - b. Kepala Sub Bagian Perhubungan.
4. Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- a. Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Keuangan;
- b. Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Jasa Produksi.

Struktur Organisasi
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



C. Fungsi Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan fungsi strategis tersebut, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Peran :

Perumusan program, kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, sarana perekonomian,

pengembangan investasi dan BUMD serta ketatausahaan biro, untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Pelaksanaan sebagian urusan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

D. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan BUMD serta ketatausahaan biro, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2020.

E. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Gambaran Umum Organisasi
 - 1.2. Fungsi Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
 - 1.3. Isu Strategis Organisasi
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. RPJMD 2018 - 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tabel II.1
RPJMD 2018 - 2023
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	100	100	100	100	100
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	100	100	100	100	100
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah						
Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	100	100	100	100	100
Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah						
Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan	%	100	100	100	100	100

UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya						
Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100	100	100

2. Renstra 2018-2023

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Perekonomian, sebagai berikut :

Tabel II.2
RENSTRA 2018 - 2023
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah				Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
				Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	77	78	79
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah			Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80	85	90	93	96
				Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang	85	89	90	93	95

				Perekonomian					
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	100	100	100	100
		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	12	12	12	12	12
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	12
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat	12	12	12	12	12
		Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	2	2	2	2	2

			ai kebi- ja- kan bid- ang Perin- dustri- an, Perda- ganga- n, Koper- asi, dan UKM						
				Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	4	4	4	4	4
			Perse- ntase Hasil Ringk- as Kebija- kan (Polic- y Brief) yang diusul- kan sebag- ai kebi- ja- kan pengu- atan dan efisie- nsi BUMD	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	5	3	3	3	3
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	3	3	3	3	3

			Perse ntase Hasil Ringk as Kebija kan (Polic y Brief) yang diusul kan sebag ai kebi ja kan bidan g Perhu bunga n, Penan aman Modal dan Pariwi sata	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	3	3	3	3	3
				Jumlah rumusan Ringkas kebjakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan pariwisata	2	2	2	2	2
		Peningkat an Kualitas Pelaksana an Kebijakan Daerah	Perse ntase kegiat an strate gis bidan g Perin dustri an, Perda ganga n, Koper asi, dan UKM yang	jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	2	2	2	2	2

			dievaluasi pelaksanaannya						
				jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	2	2	2	2	2
				jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	3	3	3	3	3
			Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	4	4	4	4	4
				jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	3	3	3	3	3
			Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	2	2	2	2	2

				jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	2	2	2	2	2
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	Perse ntase peran gkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	1	1	1	1
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	4	4	4	4	4
			Perse ntase tingkat kesehatan BUMD	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	1	1	1	1	1
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	2	2	2	2	2
			Perse	Jumlah	1	1	1	1	1

			ntase peran gkat daera h bidan g Perhu bunga n, Penan aman Modal dan Pariwi sata yang yang dieval uasi pelak sanaa n fungsi nya	laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan					
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	2	2	2	2	2

3. Indikator Kinerja Utama 2018 - 2023

Berdasarkan Renstra Tahun 2018 - 2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah menetapkan seluruh indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen IKU sebagaimana terlampir.

4. Perjanjian Kinerja

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Adapun Perjanjian kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020 secara lengkap sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Sampai dengan akhir tahun 2019 , Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel III.1
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	90-100	Sangat Baik
2.	80-89	Baik
3.	50-79	Cukup Baik
4.	≤ 49	Kurang

“Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah” merupakan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan Renstra Tahun 2018 - 2023, sedangkan didalam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat 8 (delapan) Biro yang membantu dalam pencapaian ujuan

tersebut. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah .

B. Target Dan Realisasi Tahun 2020

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahun 2020, sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan, ditetapkan sasaran dan indikator dengan target sebagai berikut :

Tabel III.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Tujuan : Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	85
Meningkatnya Efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat	Persentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum keprotokolan dan kehumasan	85

Sedangkan pada bulan Maret 2020, Biro Perekonomian Setda terdampak pandemi Covid 19 sehingga pada bulan April 2020 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mengalami revocusing sebesar Rp. 4.027.873.000,- dari Anggaran semula Rp. 6.922.000.000,- menjadi sebesar Rp. 2.984.127.000,-

(58,19 %), sehingga untuk mengetahui realisasi kinerja tahun 2020 setelah revocusing dan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan, ditetapkan sasaran dan indikator dengan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
Tujuan : Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80
Meningkatnya Efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	70
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	80
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat	Persentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum keprotokolan dan kehumasan	76

Realisasi capaian per indikator sasaran sebagai berikut :

- a) Indikator Sasaran 1 : Persentase hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang terealisasi.

Tabel III.3
Capaian Indikator Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian Tahun Lalu (%)	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra (%)
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	80	80	100	100 (tahunan)

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perekonomian. Dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar 97,70 %, Biro Perekonomian dapat merealisasikan hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang tertuang dalam policy brief sebesar dengan tingkat capaian 100 % dengan keberhasilan dalam mencapai rekomendasi dengan tahap rapat dan monitoring dengan OPD terkait, 35 Kab/Kota dan steakholder dalam hal pengumpulan data dalam mencapai hasil guna memperoleh suatu kebijakan.

- b) Indikator Sasaran 2 : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi.

Tabel III.4
Capaian Indikator Sasaran 2

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian Tahun Lalu (%)	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra (%)
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	80	80	100	100 (tahunan)

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan . Dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar 87,78 %, Biro Perekonomian dapat merealisasikan hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan sebesar dengan tingkat capaian 100 % yang tertuang dalam jumlah laporan monitoring dengan dasar untuk menyamakan leglitas dalam mencapai acuan/output sehingga dapat digunakanke seluruh 35 Kab/Kota di Jawa Tengah.

- c) Indikator Sasaran 3 : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi

Tabel III.5
Capaian Indikator Sasaran 3

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian Tahun Lalu (%)	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra (%)
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	80	80	100	100 (tahunan)

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan . Dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar 96,40 %, Biro Perekonomian dapat merealisasikan hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan sebesar dengan tingkat capaian 100 % yang tertuang dalam jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah dengan mengumpulkan semua jenis pengaduan - pengaduan yang di tujukan ke Provinsi Jawa Tengah (Biro Perekonomian) dengan dasar memotong rantai biro kerasi dalam pelayanan masyarakat.

C. Kinerja Keuangan

1. Analisis Capaian

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan APBD 2020 dengan anggaran Rp. 2.894.127.000,- yang terdiri dari 4 (empat) program dengan 22 kegiatan. Dan pada akhir tahun 2020 target keuangan yang telah dicapai sebesar Rp. 2.482.027.149,- atau sebesar 85,76 % dengan realisasi fisik tercapai 100 %. Adapaun laporan

perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Biro Perekonomian Tahun 2020 secara lengkap sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Biro Perekonomian dapat dianalisis atas efisiensi penggunaan anggaran (sumber daya) Rp. 2.482.027.149,- (85,76 %) dari anggaran Rp. 2.894.127.000,- dengan realisasi fisik tercapai 100 %. Sehingga hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar Rp. 412.099.851 ,- (14,24 %) untuk kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Anggaran DBHCHT **tidak ikut** di revocusing;
- b. Kegiatan DBHCHT di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan sekretariat dengan kegiatan sosialisasi, FGD, rapat, monitoring dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan kegiatan DBHCHT pada masa pandemi dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan termasuk pelaksanaan kegiatan secara virtual (sosialisasi, FGD, rapat, monitoring dan evaluasi) dengan menggunakan *Zoom Meeting*.

Beberapa contoh dokumentasi yang pelaksanaan kegiatan di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka), sebagai berikut :



Rapat Koordinasi Peran Pemkab dan Pemkot Dalam Pengembangan Pariwisata di Jawa Tengah



FGD Peran Infrastruktur Transportasi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah



Audiensi Pemprov Jateng Dengan Dirjen Perhubungan Laut Terkait Pengembangan Kendal Sea Port

2. Program/kegiatan

Pada dasarnya semua ke 4 (empat) program dengan 22 kegiatan merupakan program/kegiatan yang menunjang kinerja Biro perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat di buktikan dengan adanya prestasi yang diraih oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, seperti :

- a. TPID Award tahun 2020 (Tim Pengendali Inflasi Daerah) terbaik wilayah Jawa dan Bali;
- b. TPKAD terbaik Nasional tahun 2020.

3. Isu Strategis

- a. Memaksimalkan kebijakan yang sudah direkomendasikan pada rumpun ekonomi;
- b. Melaksanakan Misi dan Visi Gubernur Tengah salah satunya dengan melaksanakan program prioritas yang dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan yang bekerja sama dengan OPD yang ada seperti :

- 1) Optimalisasi peran TPID untuk menjaga ketersediaan, kestabilan harga/inflasi rendah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
- 2) Optimalisasi penggunaan DBHCHT untuk kepentingan/kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan mendukung kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bidang Koperasi, LKM dan UKM.
- 4) Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga Perekonomian yang ada di Desa (BUMDes dan Koperasi).
- 5) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
- 6) Melaksanakan penyusunan kebijakan melalui Rapat Sinergitas Pengembangan dan koordinasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- 7) Melaksanakan fasilitasi dan pengawalan OPD ampunan dengan melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan OPD, dan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang BUMD, koordinasi terhadap program-program prioritas dan program strategis gubernur dan monev pelaksanaan kebijakan.
- 8) Mendorong pemberian kredit kepada UMKM oleh PD BPR BKK dan PD BKK serta penjaminannya oleh PT. Jamkrida Jateng.
- 9) Mendorong pemanfaatan dana CSR BUMD Pemprov. Jateng untuk turut serta dalam program pengentasan kemiskinan.
- 10) Melaksanakan fasilitasi dan pengawalan OPD ampunan dengan melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan OPD, dan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perhubungan, penanaman modal dan pariwisata melalui penyusunan policy brief, koordinasi terhadap program-program prioritas dan program strategis gubernur dan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan.

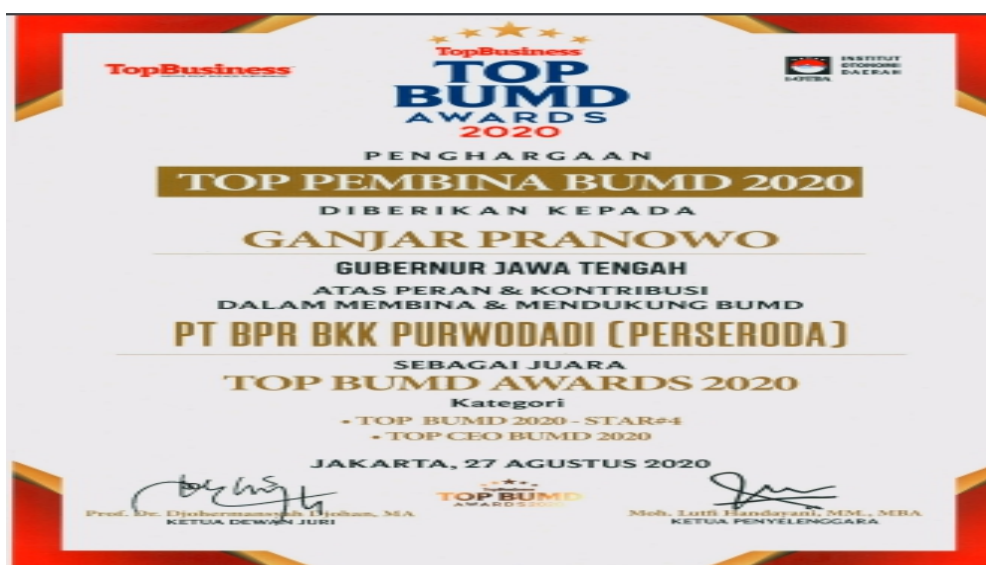
4. Permasalahan dan solusi

Tabel III.6
Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	a. Serapan alokasi DBHCHT kurang maksimal; b. Keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.206/PMK 07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT	a. Memaksimalkan serapan alokasi dana DBHCHT; b. Melakukan penyesuaian program/kegiatan penggunaan DBHCHT sebelum berdasarkan PMK 206 melalui Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan atau/dalam APBD perubahan TA. 2021
2	UMKM di Jawa Tengah belum terfasilitasi semua terkait program KUR;	a. Melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Kab/Kota se Jateng untuk dapat bekerjasama dengan bank penyalur KUR mensosialisasikan program KUR kepada UMKM; b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan pelaku UMKM di Jateng untuk memberikan informasi terkait dengan program KUR;
3	Belum semua Pemda Kab/Kota se-Jawa tengah yang mempunyai SK Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);	Melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Kab/Kota terkait upaya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan ditindaklanjuti dengan menyurati dengan Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota se Jateng;
4	Tidak terfasilitasinya LKM yang belum berbadan hukum akan bertransformasi sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2013;	Memberikan fasilitasi kemudahan proses transformasi legalitas LKM kepada para pengelola LKM di Jawa Tengah;
5	Sinergi antar BUMD masih kurang optimal;	Memfasilitasi BUMD untuk bersinergi antar BUMD serta bersinergi dengan SKPD terkait (telah terealisasi MoU sinergi BUMD/N Pemprov. Jateng);
6	Masa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap bisnis BUMD khususnya bidang Pariwisata, Jasa, Perdagangan, Perbankan.	Memetakan kembali strategi bisnis BUMD dengan mengoptimalkan potensi dalam kondisi pandemi antara lain dengan mengoptimalkan promosi dengan media online, serta mempersiapkan beberapa fasilitas pengembangan bisnis sehingga pada saat pandemi berakhir bisnis BUMD sudah langsung menangkap market. Untuk BUMD

		bidang Perbankan inovasi layanan dan pemasaran melalui digitalisasi.
7	Peran BUMD dalam mendukung program penyediaan komoditas pangan masih kurang	menselaraskan strategi bisnis bisnis BUMD untuk berperan dalam program komoditas pangan antara lain dengan (pembangunan pabrik garam, peternakan sapi potong, import produk hortikultura, pembangunan Rice Milling Unit (RMU) berkerjasama dengan koperasi petani dgn skema korporasi petani, serta menyediakan akses perbankan kepada para petani. Dibidang
8	Perda BUMD tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan bisnis	Secara bertahap akan disesuaikan Perda BUMD terkait dengan substansi penyesuaian Bentuk Badan Hukum BUMD (amanat UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah), modal dasar, dan pengaturan kebutuhan bisnis masing-masing BUMD, pada Tahun 2020 telah dibahas perubahan Perda PT PRPP, PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan PDAB Tirta Utama (ditetapkan awal Tahun 2021) dan di Tahun 2021 telah diusulkan dalam prolegda perubahan Perda PD CMJT, PT Jamkrida Jateng, PT SPJT dan PT Bank Jateng (Perda inisiatif legislatif)
9	Terkendalanya Proses transformasi PT BKK Jateng (hasil konsolidasi PD BKK se Jateng) menjadi PT BPR BKK Jateng serta penyelesaian status 2 PD BKK yang tidak diikutkan Konsolidasi dan penyelesaian dana nasabah PD BKK Pringsurat	Penetapan Perda tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang mencakup persyaratan pengajuan izin operasional PT BPR BKK Jateng sekaligus menyelesaikan permasalahan status 2 PD BKK yang tidak diikutkan Konsolidasi dan penyelesaian dana nasabah PD BKK Pringsurat

Penghargaan yang diterima tahun 2020 :





Penghargaan TOP Pembina BUMD 2020



Penghargaan Provinsi Terbaik Pengendali Inflasi Daerah
Menko Perekonomian

BAB IV

P E N U T U P

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian untuk mendukung terwujudnya Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari Tetap *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi* dan Misi mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian yang semakin tertib, stabil dan mantap mempunyai tujuan mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah yang masuk dalam penjabaran 10 program unggulan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD non teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan pada masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Amat Baik**.

Penggunaan Tahun Anggaran 2020 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 412.099.851 ,- (14,24 %)** dari anggaran yang disediakan yang paling besar pada anggaran DBHCHT dikarenakan anggaran DBHCHT tersebut tidak ikut di revocusing, akan tetapi pelaksanaan kegiatan DBHCHT pada masa pandemi dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan termasuk

pelaksanaan kegiatan secara virtual (sosialisasi, FGD, rapat, monitoring dan evaluasi) dengan menggunakan *Zoom Meeting*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

**Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Tengah**

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1001